



► POLEMIK TPS3R KARANGMIRI

Pemkab-Pemkot Bakal Berembuk

BANTUL—Pemerintah Kabupaten Bantul akan berkoordinasi dengan Pemkot Jogja terkait protes warga Jagalan, Banguntapan mengenai keberadaan Tempat Pengolahan Sampah *Reduce-Reuse-Recycle* (TPS3R) Karangmiri milik Pemkot Jogja.

Diharapkan dengan adanya koordinasi tersebut, maka persoalan yang timbul terkait keberadaan TPS3R Karangmiri bisa segera teratasi. "Saat ini Pemkab Bantul sedang dalam proses komunikasi dengan Pemkot Jogja untuk penyelesaian masalah ini," kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Bantul Ari Budi Nugroho, Selasa (4/6).

Kepala Bagian Tata Pemerintahan Pemkab Bantul Roy Robert Edison Bonay mengungkapkan Kalurahan Jagalan secara geografis masuk Kabupaten Bantul. Hal ini didasari Peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri) No.15/2012 tentang Batas

Daerah Kota Jogja dengan Kabupaten Bantul.

"Secara geografis masuk Bantul. Tetapi Kota punya sertifikat [tanah] atas dasar penyerahan tanah eks *enclave* dari Pemda DIY ke Pemkot Jogja. Itu dilakukan jauh sebelum ada Permendagri," terang Roy.

Atas dasar keberadaan sertifikat tanah eks *enclave* tersebut, Roy menilai Pemkot Jogja tidak melakukan sosialisasi kepada warga Jagalan yang menjadi lokasi pembangunan TPS3R Karangmiri. "Kalau patok wilayah, itu saya yang pasang 2006. Sebelum 2006, itu sertifikat *enclave* telah ada," kata dia.

Menurut Roy, pihaknya sejatinya telah melakukan langkah-langkah agar persoalan batas wilayah ini tidak jadi masalah ke depan. Salah satunya adalah Pemkab Bantul minta difasilitasi oleh Pemda DIY terkait batas wilayah. "Tetapi kaitannya

dengan penyerahan P3D, aset dan lain-lain sampai saat ini digantung terus sampai hari ini," katanya.

Sementara terkait dengan persoalan tidak adanya sosialisasi dari Pemkot Jogja kepada warga Jagalan, Roy mengaku sudah ada empat kali rapat yang digelar dengan melibatkan Pemkab Bantul, Pemkot Jogja dan Pemda DIY.

Sebelumnya, sejumlah spanduk protes keberadaan TPS3R Karangmiri, dipasang oleh warga Jagalan, Banguntapan. Salah satu warga Jagalan yang enggan disebutkan namanya mengaku jika spanduk itu dipasang sebagai bentuk protes keberadaan TPS3R Karangmiri. Sebab, selain tidak ada sosialisasi dari Pemkot Jogja ke warga. Keberadaan TPS3R itu juga berada di dalam lingkungan permukiman. "Izin TPS3R itu juga belum diurus ke Pemkab Bantul," katanya. (Jumail)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 17 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005